

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI
PARIWISATA KABUPATEN SAMOSIR (STUDI PADA KAMPUNG ULOS
HUTARAJA)**

¹Carol Ratna Alyssa Nainggolan, ²Fitriyah, ³Supratiwi
Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://fisip.undip.ac.id/> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), kawasan wisata Danau Toba menjadi prioritas pengembangan daerah pariwisata. Kampung Hutaraja adalah salah satu permukiman di sekitar Danau Toba yang dipilih oleh Presiden Indonesia Joko Widodo untuk direvitalisasi karena memiliki komunitas budaya yang menarik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mengembangkan objek wisata Kampung Ulos Hutaraja serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan pengembangan pariwisata. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata oleh Pitana dan Gayatri (2005) dan pendapat Eddyono tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dan informasi dikumpulkan melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, lebih menonjol sebagai dinamisor dalam pengembangan pariwisata di Kampung Ulos Hutaraja. Meskipun terlibat sebagai motivator dan fasilitator, pemerintah daerah terutama fokus pada inisiasi dan penggerakan berbagai kegiatan dan program untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, dengan kolaborasi yang efektif dengan pihak ketiga. Faktor pendukung seperti atraksi wisata, fasilitas, dan infrastruktur memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pariwisata, namun tantangan dalam transportasi dan kurangnya kesadaran serta keterlibatan masyarakat menjadi hambatan yang perlu diatasi. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap kedua sisi ini, pemerintah dapat merancang kebijakan yang holistik dan efektif untuk mengembangkan pariwisata di Kampung Ulos Hutaraja secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pariwisata, Pengembangan daerah, Peran Pemerintah

Abstract

As one of the National Tourism Strategic Areas (KSPN), the Lake Toba tourist area is a priority for tourism development. Hutaraja Village is one of the settlements around Lake Toba chosen by Indonesian President Joko Widodo to be revitalized because it has an interesting cultural community. The purpose of this research is to analyze the role of the Samosir Regency Government in developing the Hutaraja Ulos Village tourist attraction and the factors that influence the sustainability of tourism development. The theory used in this research is the theory of the role of government in tourism development by Pitana and Gayatri (2005) and Eddyono's opinion on factors that influence tourism development.

This research uses descriptive research method and descriptive qualitative approach. Data and information were collected through interviews, documentation, and observation techniques. The research findings show that the Samosir Regency Government, through the Culture and Tourism Office, is more prominent as a dynamizer in the development of tourism in Ulos Hutaraja Village. Although involved as a motivator and facilitator, the local government mainly focuses on initiating and mobilizing various activities and programs to encourage the growth of the tourism sector, with effective collaboration with third parties. Supporting factors such as attractions, facilities, and infrastructure make an important contribution to tourism development, but challenges in transportation and lack of community awareness and involvement are obstacles that need to be overcome. With an in-depth understanding of both sides, the government can design holistic and effective policies to develop tourism in Ulos Hutaraja Village in a sustainable manner.

Keywords: *Tourism, Regional Development, Government Role*

PENDAHULUAN

Sistem otonomi daerah, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan mereka sendiri. Ada banyak sektor yang bisa dikembangkan salah satunya adalah sektor pariwisata (Nurhadi, dkk. 2021; 325-326).

Bidang kepariwisataan merupakan salah satu pilar pembangunan nasional karena berkontribusi dalam meningkatkan devisa negara, penghasilan daerah, pembangunan daerah, menyerap investasi dan tenaga kerja, serta mampu merangsang sektor-sektor produktif lainnya. Program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya serta potensi pariwisata di tingkat daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi. Peran pemerintah menjadi krusial dalam mendukung pengembangan destinasi wisata baru, dengan memperhatikan lima faktor utama yang perlu dipenuhi untuk mengembangkan suatu daerah menjadi destinasi wisata, yaitu obyek wisata, fasilitas, infrastruktur, transportasi, dan akomodasi hotel (Pebriana, 2021:13).

Geografis dan topografis Indonesia mendukung sektor ini. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki kebudayaan, adat istiadat, seni, dan warisan sejarah yang beraneka ragam dan tidak kalah menarik dengan keindahan alam yang dimiliki. Namun, pengembangan kepariwisataan masih terkonsentrasi di Pulau Bali dan Yogyakarta. Namun, banyak wilayah lain yang memiliki potensi dan daya tarik yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata. Data *Travel and Tourism Competitiveness Index* (TTCI) dari *World Economic Forum* (WEF) menunjukkan meningkatnya ranking pariwisata Indonesia. Pada tahun 2013 Indonesia rangking 70, kemudian tahun 2019 berada di posisi 40. Meskipun peringkat Indonesia semakin meningkat, hal tersebut tidak menandakan bahwa pengembangan sektor pariwisata sudah selesai sepenuhnya. Masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi di dalamnya (Saragih & Surya, 2021: 38).

Pada tanggal 15 Juli 2019 Presiden Joko Widodo menyatakan akan mengembangkan destinasi pariwisata super prioritas pada lima daerah yakni, Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika-Lombok (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Likupang (Sulawesi Utara).

Dalam Wardani & Nasution (2016:5) disebutkan bahwa Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2010-2025, pemerintah menetapkan kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) di sektor pariwisata, yang lebih lanjut dikenal sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kawasan wisata Danau Toba menjadi prioritas pengembangan daerah pariwisata dalam skala pelayanan nasional dan internasional.

Salah satu kabupaten yang termasuk wilayah Danau Toba, yaitu Samosir. Kabupaten Samosir memiliki kewenangan otonom dalam pengelolaan sektor-sektor berbagai, termasuk sektor pariwisata. Penetapan kriteria dan klasifikasi objek wisata di Kabupaten Samosir diatur melalui Keputusan Bupati Samosir Provinsi Sumatera Utara Nomor 474 Tahun 2017.

Dalam Saragih & Surya (2021: 69), Kabupaten Samosir dijuluki sebagai “Negeri Indah Kepingan Surga.” Tentunya julukan tersebut dibuktikan dengan kenyataan dan data-data di lapangan dimana banyaknya destinasi wisata terdapat di Pulau tersebut.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Samosir 2015-2022

Tahun <i>Year</i>	Wisatawan/ <i>Tourist</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Asing <i>Foreign</i>	Nusantara <i>Domestic</i>	
2015	34248	141215	175463
2016	35823	154905	190728
2017	55771	222288	278059
2018	65724	312925	378649
2019	50970	367301	418271
2020	2908	402295	405203
2021	0	663848	663848
2022	2953	857939	860892

Sumber: BPS Kabupaten Samosir, 2022

Berdasarkan data dalam tabel di atas, terlihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Samosir dari tahun 2015 hingga 2022 terus meningkat. Namun, pada tahun 2020, selama masa pandemi Covid-19, terjadi penurunan signifikan sebesar -3,12 persen. Pada tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Samosir mengalami peningkatan kembali, mencapai 663.848 kunjungan, dengan catatan bahwa kunjungan tersebut berasal dari wisatawan nusantara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 857.939 kunjungan berasal dari wisatawan nusantara (99,66 persen), sementara 2.953 kunjungan berasal dari wisatawan asing (0,34 persen).

Salah satu destinasi wisata terkenal di Kabupaten Samosir adalah Kampung

Ulos Hutaraja, yang terletak di Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Dilansir dari suarausu.or.id (2023), kampung ini dikenal sebagai pusat pembuatan kain ulos khas Batak yang diproduksi secara manual, dengan latar belakang Rumah Bolon. Meskipun Kampung Ulos Hutaraja sudah ada sejak lama, proses pembangunan berkelanjutan belum sepenuhnya dilakukan. Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke kawasan ini. Dengan kunjungan langsung dari Presiden Jokowi, kampung ini diangkat menjadi Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba.



Gambar 1. 1 Kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo (Sumber: sahabat.pu.go.id, (2019))

Sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Pemerintah Kabupaten Samosir diharapkan untuk menunjukkan komitmen dalam mengembangkan sektor pariwisata dengan mengadopsi perencanaan yang

berkelanjutan dan berkesinambungan. Hal ini memungkinkan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal.

Dengan memperhatikan fenomena dan ide-ide yang ada, Kampung Hutaraja menjadi pilihan penelitian yang tepat untuk memperkuat upaya pengembangan Permukiman Tradisional Batak Toba dalam konteks pengembangan sektor pariwisata di Kawasan Danau Toba. Maka penelitian ini akan mengkaji peranan pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Samosir dalam upaya pengelolaan dan pengembangan objek wisata Kampung Ulos Hutaraja. Serta penting untuk melakukan identifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam upaya pengembangan permukiman tradisional Batak Toba sebagai destinasi wisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dipilih sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang melalui pendekatan dalam mengeksplorasi suatu gejala sentral dengan melibatkan wawancara dengan partisipan penelitian, dimana pertanyaan yang diajukan bersifat umum dan menyeluruh. Kemudian informasi tersebut nantinya dikumpulkan, dianalisa, dan diinterpretasi lebih mendalam (Creswell, 2014).

Pemilihan metode ini dilakukan karena peneliti berupaya untuk menguraikan situasi di lapangan dan melakukan analisis yang menyeluruh terkait peran pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata Kampung Ulos Hutaraja di Kabupaten Samosir.

Subjek penelitian merupakan orang yang mampu memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, teknik *purposive sampling* digunakan dengan menetapkan kriteria khusus atau karakteristik tertentu sebagai pertimbangan dalam pemilihan sampel atau subjek penelitian. Subjek penelitian ini melibatkan Kepala Bidang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir, Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi, Pokdarwis dan Komunitas pengrajin kain tenun ulos, dan para wisatawan.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari analisis data dalam penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah yang sedang diteliti. Pendekatan deskriptif kualitatif melibatkan proses analisis, deskripsi, dan ringkasan dari berbagai kondisi dan situasi yang diungkapkan melalui data yang terkumpul, seperti hasil wawancara atau observasi, terkait dengan isu yang sedang

diteliti di lapangan. Proses ini mencakup langkah-langkah pengumpulan data, reduksi, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan potensi Kampung Ulos Hutaraja sebagai objek wisata unggulan di Kabupaten Samosir. Pitana dan Gayatri (2005:95), mengemukakan pemerintah daerah memiliki tiga peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sebagai : Motivator, Fasilitator, dan Dinamisator.

1. Peran Pemerintah Kabupaten Samosir Sebagai Motivator

Dalam upaya pengembangan sektor pariwisata, peran pemerintah sebagai motivator memiliki peran penting. Dalam konteks ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memegang peranan signifikan dalam menginspirasi masyarakat dan para pelaku wisata untuk aktif terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan potensi Kampung Ulos Hutaraja sebagai destinasi wisata utama di Kabupaten Samosir.

Beberapa metode yang dianggap efektif oleh pemerintah daerah Kabupaten Samosir mencakup: (1) melakukan

penyadaran, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengelola dan pengusaha lokal untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya program pemberdayaan dalam meningkatkan kualitas hidup secara mandiri; (2) melalui pengkapasitasan, di mana masyarakat (pengelola objek wisata Kampung Ulos Hutaraja) diberikan keterampilan sebelum proses pemberdayaan dimulai, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan kelompok organisasi; dan (3) menggunakan metode pendayaan, di mana para pengelola objek wisata Kampung Ulos Hutaraja, seperti pemilik homestay dan coffee shop, diberdayakan dengan memberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan tingkat kemampuan atau kecakapan yang dimiliki.

a) Kegiatan Penyuluhan

Hasil observasi di lapangan menunjukkan sejumlah OPD seperti Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, berperan aktif dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan kebersihan dan sanitasi di destinasi pariwisata. Selain itu, asosiasi, seperti Asosiasi Housekeeper Indonesia Cabang Sumatera Utara, dan mitra eksternal memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dalam pemberdayaan masyarakat desa senantiasa melakukan penyuluhan terhadap masyarakat dengan

menyesuaikan kebutuhan di wilayah tersebut. Penyuluhan yang biasanya berisi informasi-informasi peningkatan sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas objek wisata

b) Kegiatan Pelatihan

Proses pelatihan kepariwisataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur pariwisata di wilayah mereka.

Berdasarkan hasil penelitian, Disbudpar menerapkan metode, sbb: (1) Persiapan; tahapan ini termasuk menyiapkan petugas penyuluh dan lokasi untuk kegiatan penyuluhan sebagai tahap awal. (2) Pengkajian; tahapan ini merupakan proses identifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk kebutuhan mereka. (3) Perencanaan alternatif program; tahap ini merupakan langkah responsif jika program yang dijalankan tidak mencapai efektivitas atau tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, sehingga perlu program alternatif sebagai pengganti.

Namun, pelatihan tersebut menghadapi tantangan yang signifikan. Partisipasi masyarakat cenderung bergantung pada insentif materi, seperti "uang duduk," baju, dan makanan, sehingga tanpa insentif

tersebut, tingkat partisipasi menurun. Selain itu, kebersamaan menjadi hal penting dalam menjalankan program pelatihan, namun kendala sosial seperti sulitnya mengumpulkan masyarakat dapat menjadi hambatan.

2. Peran Pemerintah Kabupaten Samosir Sebagai Fasilitator

Menurut Pitana dan Gayatri (2005:95), fungsi pemerintah sebagai fasilitator mencakup perannya dalam memfasilitasi dan mendukung segala kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan potensi wisata, baik fasilitas fisik maupun nonfisik yang mendukung segala program pariwisata.

a) Kegiatan pendampingan usaha

Pendampingan usaha untuk pengelola objek wisata di Kampung Ulos Hutaraja oleh pemerintah daerah Kabupaten Samosir belum dilakukan secara rutin terhadap kelompok-kelompok usaha mandiri tersebut. Para pelaku usaha menginginkan pendampingan yang lebih intensif, di mana setiap masalah atau kendala yang dihadapi oleh pengelola objek wisata Kampung Ulos Hutaraja melalui usaha mandiri dapat diselesaikan melalui forum diskusi bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kegiatan seperti ini penting untuk dilakukan guna mengukur perkembangan usaha kelompok

dan mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai kebutuhan mereka, serta termasuk memberikan solusi terkait kendala teknis maupun finansial.

b) Bantuan Finansial

Pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) belum memenuhi perannya dalam pemberian bantuan dana ataupun finansial kepada pelaku wisata di Kampung Ulos Hutaraja. Meskipun demikian, mereka melakukan pembinaan dan pelatihan, khususnya terkait dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan aspek kehospitalitan (pelayanan tamu) di destinasi wisata.

c) Promosi Wisata

Disbudpar memiliki peran yang signifikan dalam mempromosikan Kampung Ulos. Pemanfaatan media sosial dan promosi daring menunjukkan kesiapan mereka dalam mengadopsi strategi modern dalam mempromosikan destinasi pariwisata untuk mencapai audiens yang lebih luas. Selain itu, Disbudpar Kabupaten Samosir aktif terlibat dalam mempromosikan objek wisata Kampung Ulos Hutaraja melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Strategi ini bertujuan untuk menggaungkan dan memperluas promosi Kampung Ulos,

menunjukkan kesadaran akan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mendukung pertumbuhan pariwisata di wilayah tersebut

d) Membangun sarana prasarana objek wisata

Dalam hal ini Pemerintah daerah memfasilitasi atau menyediakan segala fasilitas baik fasilitas fisik maupun nonfisik yang mendukung segala program pariwisata. Dari hasil observasi, pemerintah dalam pengelolaan fasilitas fisik di objek wisata Kampung Ulos Hutaraja merupakan peran dari pemerintah pusat dalam menyediakan sarana dan prasarana yang berasal dari pemerintah pusat yaitu melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sementara pemerintah daerah lebih berfokus pada pendidikan dan edukasi serta penanganan keluhan masyarakat terkait aspek *hospitality*.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tentunya sudah bagus adanya, tapi masih ada beberapa fasilitas yang tidak dikelola dengan baik atau luput dari perhatian pemerintah. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah

dan masyarakat selaku pengelola objek wisata ini, demi kenyamanan wisatawan.

3. Peran Pemerintah Kabupaten Samosir Sebagai Dinamisor

Pitana dan Gayatri (2005: 95) menyoroti pentingnya sinergi antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam konteks *good governance* atau tata kelola yang baik.

Data di atas menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir, sudah melakukan perannya sebagai dinamisor. Hal ini ditunjukkan melalui kerja sama dengan beberapa pihak ketiga, termasuk Bank Indonesia (BI), Taspen, dan perguruan tinggi seperti Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Samosir dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat serta pengunjung.

Gambar 1.2 Toba Joujou Festival
2022 di Kampung Ulos Hutaraja



Sumber: <https://samosirkab.go.id>,
(2022)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Pariwisata

Faktor-faktor yang diuraikan oleh Eddyono, (2021:76) dalam bukunya yang berjudul “Pengelolaan Destinasi Pariwisata” disebutkan ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam mengembangkan pariwisata menjadi poin kunci dalam pengembangan pariwisata.

1. Faktor Pendukung

Faktor-faktor pendukung dalam pengembangan sektor pariwisata memegang peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan destinasi pariwisata.

a) Atraksi Wisata

Atraksi wisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik, baik benda yang berbentuk fisik maupun

non-fisik. Hasil wawancara dengan para wisatawan yang menyambangi Kampung Ulos Huta Raja menggambarkan bahwa destinasi ini berhasil menciptakan daya tarik yang istimewa. Interaksi langsung dengan pengrajin tenun ulos dan atmosfer tradisional yang begitu kental. Keunikan seni tenun ulos dan kehidupan budaya lokal menjadi poin penting yang mencerminkan fokus destinasi pada pelestarian warisan budaya.

Gambar 1.3 Atraksi tenun ulos



Sumber: Dokumentasi pribadi

b) Fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan para wisatawan yang berkunjung ke Kampung Ulos Hutaraja, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari mereka memberikan penilaian positif terkait ketersediaan dan kualitas fasilitas di

objek wisata tersebut. Para wisatawan menyoroti pengalaman positif mereka terkait fasilitas di kampung tersebut, seperti akomodasi, restoran, cafe, galeri yang dianggap memadai. Namun tetap terdapat rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan. Salah satu aspek yang disoroti adalah kebutuhan akan gazebo atau tempat duduk yang lebih nyaman,

c) **Infrastruktur**

Berdasarkan, temuan penelitian infrastruktur di sekitar kampung tersebut mendapatkan respon positif dan negatif. Sebagian besar wisatawan memberikan penilaian positif terhadap aksesibilitas dan kondisi jalan raya yang baik, serta berfungsinya infrastruktur dasar seperti jaringan listrik dan sanitasi. Mereka mengapresiasi kemudahan akses menuju kampung, yang ditandai dengan kondisi jalan yang sudah diaspal, memberikan kenyamanan dalam perjalanan.

Di sisi lain, terdapat respon negatif terkait pemeliharaan infrastruktur yang dianggap kurang optimal. Beberapa wisatawan menyoroti kurangnya perawatan terhadap fasilitas seperti taman yang ditumbuhi semak-semak

dan penanda kampung yang tidak terawat dengan baik.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam konteks pariwisata merujuk pada berbagai halangan atau kendala yang dapat memperlambat atau menghambat perkembangan industri pariwisata.

1. Transportasi

Transportasi menjadi permasalahan yang signifikan, dimana wisatawan menyampaikan bahwa pengalaman mereka dalam mengakses sarana transportasi menuju kampung tersebut menantang dan kurang memuaskan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan opsi transportasi umum di sekitar wilayah tersebut. Meskipun terdapat beberapa angkutan umum, frekuensi dan jadwalnya tidak jelas, terutama bagi wisatawan yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan kesulitan dalam perencanaan perjalanan, menurunkan tingkat kenyamanan, serta berpotensi mengurangi daya tarik destinasi.

2. Hospitalitas

Konsep hospitalitas sangat penting dalam industri pariwisata, karena pelayanan yang baik dapat menciptakan

pengalaman positif bagi para wisatawan untuk memberikan pengalaman yang berkesan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam di Kampung Ulos Hutaraja, ditemukan bahwa pelayanan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di destinasi tersebut memiliki aspek negatif dan beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan.

Di sisi positif, beberapa momen berkesan menunjukkan upaya positif dalam meningkatkan pengalaman tamu melalui interaksi langsung dengan pengrajin tenun ulos. Meskipun begitu, adanya kelambanan atau kaku pada sebagian pengrajin tenun ulos dalam berbagi cerita dan pengalaman dengan wisatawan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan dan Kabid. Usaha Pariwisata dan Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir, bahwa tantangan utama dalam pengembangan objek wisata Kampung Ulos Hutaraja terletak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kurangnya kesadaran dan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam merawat serta mengembangkan potensi pariwisata menjadi hambatan utama dalam pengembangan destinasi tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Samosir lebih menonjol sebagai dinamisor dalam pengembangan pariwisata di Kampung Ulos Hutaraja. Meskipun pemerintah daerah juga berperan sebagai motivator dan fasilitator, peran dinamisor terlihat lebih dominan dalam upaya mereka untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Program penyuluhan dengan menggunakan metode penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan sebagai strategi motivator. Meskipun demikian, tantangan terkait ketergantungan masyarakat pada insentif materi menyoroti pentingnya peran motivator dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan pariwisata secara berkelanjutan.

Sebagai fasilitator, terdapat kendala seperti kurangnya rutinitas dalam pendampingan usaha dan perlu pemeliharaan fasilitas yang lebih baik, upaya pemerintah dalam memfasilitasi pengelolaan pariwisata di Kampung Ulos Hutaraja menjadi kunci keberhasilan. Peran Pemerintah Kabupaten Samosir sebagai dinamisor berkolaborasi yang efektif dengan pihak ketiga seperti Bank Indonesia, Taspen, dan perguruan tinggi

menunjukkan komitmen pemerintah dalam menggerakkan berbagai inisiatif pembangunan.

Faktor pendukung seperti atraksi wisata, fasilitas, dan infrastruktur memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pariwisata, namun tantangan dalam transportasi dan kurangnya kesadaran serta keterlibatan masyarakat menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Saran

1. Pemerintah, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, disarankan agar melakukan survei kebutuhan terkini secara berkala dengan melibatkan masyarakat lokal dan pelaku wisata. Dengan demikian, informasi yang disampaikan dalam program sosialisasi dapat lebih relevan dengan kebutuhan dan perkembangan sektor pariwisata. Selain itu, pemerintah perlu menyusun materi penyuluhan dan pelatihan yang disesuaikan dengan hasil survei tersebut.
2. Fasilitas di Kampung Ulos Hutaraja perlu terus diperbaiki untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Evaluasi mendalam terhadap fasilitas yang ada, berdasarkan umpan balik positif dan rekomendasi wisatawan, perlu dilakukan. Pemerintah daerah dapat memprioritaskan perbaikan fasilitas yang dapat meningkatkan standar pelayanan dan daya tarik destinasi. Keterlibatan pihak swasta juga dapat menjadi solusi untuk pembiayaan perbaikan fasilitas pariwisata.
3. Dalam mengatasi tantangan transportasi, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penyediaan *bus city tour*. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas wisatawan ke Kampung Ulos Hutaraja. Selain itu, penyediaan informasi transportasi yang lebih mudah diakses dan diversifikasi opsi transportasi umum perlu ditingkatkan. Kerjasama antara pemerintah daerah, operator transportasi.
4. Dalam hal hospitalitas, perlu dilakukan pelatihan dan peningkatan kesadaran terhadap pelayanan wisatawan di Kampung Ulos Hutaraja. Selain itu, kampanye kesadaran masyarakat tentang peran mereka dalam pengembangan pariwisata perlu dilakukan untuk mengatasi kurangnya keterlibatan aktif dari masyarakat dalam merawat dan mengembangkan potensi pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalyah, R., Hamid, D., & Hakim, L. (2016). Peran stakeholder pariwisata dalam pengembangan pulau samalona sebagai destinasi wisata bahari. *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 37(1), 158–163.
- A.M, Sardiman. (2007). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Anggraeni, D. F., & Fadlurrahman, M. P. . (2017). Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Dalam Pengembangan Objek Wisata. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Nefaea (JMAN)*, 02(01). [http://repository.ub.ac.id/6750/1/Pradippta Wiraloka.pdf](http://repository.ub.ac.id/6750/1/Pradippta%20Wiraloka.pdf)
- Bakaruddin. (2008). *Perkembangan Dan Permasalahan Kepariwisataaan*, UNP Press Padang.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage
- Creswell, J.W. and Miller, D.L. (2000) Determining Validity in Qualitative Inquiry. *Theory into Practice*, 39, 124-130
- Dharma, F. A. (2018). Konstruksi Realitas Sosial:Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 1-9. <https://doi.org/10.21070/kanal.v6i2.101>
- Eddyono, F. (2021). Pengelolaan Destinasi Pariwisata. In *Uwais Inspirasi Indonesia* (Vol. 3, Issue 1). [https://medium.com/@arifwicaksanaa](https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf)
- Febrianingrum, S. R., Miladan, N., & Mukaromah, H. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Pariwisata Pantai Di Kabupaten Purworejo. *Desa-Kota*, 1(2), 130. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v1i2.14762.130-142>
- Herliyani, T. P. (2019). *Peran dinas pemuda olahraga dan pariwisata dalam pengelolaan daya tarik wisata danum layong kecamatan long kali kabupaten paser*. 7(1), 209–221.
- Kementrian PUPR. (2020). Sinergitas Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas. *Kementrian PUPR*, 1–66. [https://bpiw.pu.go.id/uploads/publication/attachment/Buletin BPIW SINERGI Edisi 44 - Januari 2020.pdf](https://bpiw.pu.go.id/uploads/publication/attachment/Buletin%20BPIW%20SINERGI%20Edisi%2044%20-%20Januari%202020.pdf)
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif jakarta: Universitas Indonesia*. UI press.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurhadi, F. D. C., Mardiyono, & Rengu, S. P. (2021). Pendahuluan. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 325–331.
- Pangaribuan, J. J., Pd, S., & Pd, M. (2022). 1, 2, 3. 3(2), 69–81.
- Pebriana, F., Mulyawan, R., & ... (2021). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka Tahun 2019). ... *Administrasi Pemerintahan ...*, 1(1), 11–22. <http://jurnal.unpad.ac.id/janitra/article>

/view/33023

Pitana, G.I., & Gayatri, P.G. (2005). *Sosiologi Pariwisata (Tourism Sociology)*. Yogyakarta: CV Andy Offset.

Primadany, S. R., Mardiyono, & Riyanto. (2013). Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 135–143.

Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*.

Saputra, A., & Ali, K. (2020). Analisis Kebijakan Pariwisata Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Di Kabupaten Samosir. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 564–584. <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.889>

Saragih, M. G., & Surya, E. D. (2021). *Pariwisata Super Prioritas* (S. Widodo (ed.)). Penerbit Andalan.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wardani, M. P., & Nasution, N. A. (2016). Kontribusi Pengembangan Pariwisata Danau Toba Melalui Skema Bop (Badan Otorita Pariwisata) Bagi Masyarakat Di Sekitar Danau Melalui Skema Bop (Badan Otorita Pariwisata) Bagi Mahasiswa Pasca Sarjana, Program Sudi Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika Ma. *Working Paper, December*.

Wardhono, Fitri Indra. (2014). Kumpulan Artikel Terkait Destination Management Organization, diakses

pada tanggal 21 Oktober 2022. (<http://fitriwardhono/kumpulan-artikel-terkait-dmo>).

Yoeti, Agung Oka. (1996). *Pemasaran Parivisata*. Penerbit Angkasa: Bandung.

Yoeti, Agung Oka. (2008). *Pemasaran Parivisata*. Penerbit Angkasa: Bandung.

Zebua, M. (2016). *Inspirasi pengembangan pariwisata daerah*. Deepublish.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati Samosir Nomor 57 Tahun 2021 pasal 1 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1998 tentang pembentukan daerah tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah